



MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA

S A L I N A N

KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

NOMOR: KEP- 27 /M.EKON/05/2004

TENTANG

TIM KOORDINASI *CONSULTATIVE GROUP ON INDONESIA* (CGI)

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN,

- yang : a. bahwa untuk mendapatkan manfaat yang optimal dari kerjasama *Consultative Group on Indonesia* (CGI), perlu adanya koordinasi antar instansi terkait dan konsultasi serta negosiasi antara pemerintah dengan donor melalui pertemuan-pertemuan secara reguler;
- b. bahwa dalam rangka koordinasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas dapat berlangsung secara efektif dan efisien, perlu menetapkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tentang Tim Koordinasi *Consultative Group on Indonesia* (CGI);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tentang Tim Koordinasi *Consultative Group on Indonesia* (CGI);
- yang : 1. Keputusan Presiden Nomor 100 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Menteri Negara Koordinator sebagaimana diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2002; -
2. Keputusan Presiden Nomor 101 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Menteri Negara sebagaimana diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2002;

3. Keputusan ...



MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

3. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
4. Keputusan Presiden Nomor 228/M Tahun 2001 tentang Pembentukan Kabinet Gotong Royong;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN TENTANG TIM KOORDINASI *CONSULTATIVE GROUP ON INDONESIA* (CGI).

PERTAMA : Membentuk Tim Koordinasi *Consultative Group on Indonesia*, yang selanjutnya disebut Tim Koordinasi dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

- a. Ketua : Deputi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan;
- b. Wakil Ketua : Deputi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Bidang Koordinasi Peningkatan Kerjasama Ekonomi Internasional;
- c. Anggota :
 1. Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
 2. Deputi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Bidang Koordinasi Desentralisasi Fiskal dan Ekonomi dan Pengembangan Infrastruktur;

3. Deputi ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

3. Deputy Menteri Koordinator Bidang
Perekonomian Bidang Koordinasi
Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan
Peningkatan Produktivitas Petani-Nelayan;
4. Deputy Menteri Koordinator Bidang
Perekonomian Bidang Koordinasi
Perindustrian, Perdagangan dan
Pemberdayaan UKM;
5. Deputy Menteri Koordinator Bidang
Perekonomian Bidang Koordinasi
Peningkatan Investasi dan Kemitraan
Publik dan Swasta;
6. Deputy Menteri Koordinator Bidang
Politik dan Keamanan Bidang Pertahanan
Negara;
7. Deputy Menteri Koordinator Bidang
Kesejahteraan Rakyat Bidang
Penanggulangan Kemiskinan;
8. Direktur Jenderal Anggaran, Departemen
Keuangan;
9. Kepala Badan Analisa Fiskal, Departemen
Keuangan;
10. Direktur Jenderal Otonomi Daerah,
Departemen Dalam Negeri;
11. Direktur Jenderal Multilateral EKUBANG,
Departemen Luar Negeri;
12. Deputy Menteri Negara Perencanaan
Pembangunan Nasional /Kepala
BAPPENAS Bidang Pendanaan
Pembangunan;

13. Deputy ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

13. Deputy Menteri Negara Perencanaan
Pembangunan Nasional /Kepala
BAPPENAS Bidang Ekonomi;
14. Deputy Menteri Negara Perencanaan
Pembangunan Nasional /Kepala
BAPPENAS Bidang Politik Pertahanan
dan Keamanan;
15. Deputy Menteri Negara Perencanaan
Pembangunan Nasional /Kepala
BAPPENAS Bidang Otonomi Daerah dan
Pengembangan Regional;
16. Deputy Menteri Negara Perencanaan
Pembangunan Nasional /Kepala
BAPPENAS Bidang Sarana dan Prasarana;
17. Kepala Badan Pembinaan Hukum
Nasional, Departemen Kehakiman dan
HAM;
18. Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan
Konservasi Alam, Departemen Kehutanan;
19. Staf Ahli Menteri Kesehatan Bidang
Pelayanan Masyarakat Rentan,
Departemen Kesehatan;
20. Staf Ahli Menteri Koordinator Bidang
Perekonomian Bidang Perimbangan
Keuangan Pusat dan Daerah;

Sekretaris : Asisten Deputy Urusan Perbankan dan
Lembaga Keuangan Non Bank, Kementerian
Koordinator Bidang Perekonomian.

KEDUA ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 5 -

- KEDUA : Tugas Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama Keputusan ini adalah:
1. Mempersiapkan bahan-bahan untuk konsultasi dan negosiasi dengan donor yang tergabung dalam forum CGI;
 2. Melakukan konsultasi dan negosiasi dengan donor yang tergabung dalam forum CGI;
 3. Menyusun rekomendasi dan pertimbangan-pertimbangan kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian mengenai kebijakan pemerintah yang terkait dengan pelaksanaan kerjasama CGI;
 4. Melaksanakan tugas-tugas lain yang terkait dengan kerjasama CGI berdasarkan pengarahannya dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.
- KETIGA : Tim Koordinasi dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua Keputusan ini dapat membentuk Tim Teknis , Sekretariat Tim yang keanggotaannya ditetapkan oleh Deputi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan, selaku Ketua Tim Koordinasi.
- KEEMPAT : Ketentuan lebih lanjut dalam pelaksanaan Keputusan ini ditetapkan oleh Deputi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan, selaku Ketua Tim Koordinasi.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Koordinasi melaporkan program kerja dan pelaksanaan kegiatannya kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
- KEENAM : Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Tim Koordinasi dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

KETUJUH ...



MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 28 Mei 2004

MENTERI KOORDINATOR BIDANG
PEREKONOMIAN,

ttd.

DORODJATUN KUNTJORO-JAKTI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum dan Humas,

F.X. Dasuki
NIP.060034251

